
Perspektif Lokal versus Nasional: Analisis Komparatif Framing Media dalam Pemberitaan OTT KPK di Pemprov Kalimantan Selatan

Muhammad Ainani¹, Nur Tazkia Amalia Hamdie²
Universitas Lambung Mangkurat^{1,2}

muhammad.ainani@ulm.ac.id¹, nur.tazkia.amalia.hamdie@ulm.ac.id²

Abstrak: Pemberitaan media tentang kasus korupsi memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan mendorong upaya pemberantasan korupsi. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan framing antara media lokal dan nasional dalam pemberitaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing Robert M. Entman, penelitian ini mengkaji empat artikel berita dari dua media lokal Kalimantan Selatan (Tribun Banjarmasin dan Radar Banjarmasin) dan dua media nasional (Kompas.com dan Media Indonesia). Hasil penelitian menunjukkan perbedaan signifikan dalam framing antara media lokal dan nasional. Media lokal cenderung membingkai kasus dalam konteks lokal dengan penekanan pada dampak langsung dan solusi praktis, sementara media nasional melihatnya dalam konteks lebih luas dengan penekanan pada isu-isu struktural. Perbedaan ini mencerminkan kompleksitas pemberitaan kasus korupsi daerah dan pentingnya sinergi antara media lokal dan nasional. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi pemahaman peran media dalam membentuk persepsi publik terhadap isu korupsi, serta bagi pengembangan strategi pemberantasan korupsi dan peningkatan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini juga menyoroti perlunya penguatan jurnalisme investigatif dan peningkatan literasi media di kalangan masyarakat.

Kata Kunci: framing media, media lokal, media nasional, korupsi daerah, operasi tangkap tangan

PENDAHULUAN

Kasus korupsi di tingkat pemerintahan daerah masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Salah satu contoh terbaru adalah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan *Komisi Pemberantasan Korupsi* (KPK) terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Oktober 2024. OTT tersebut menjerat beberapa pejabat tinggi, termasuk Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dan Kepala Dinas *Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang* (PUPR) Kalimantan Selatan (Kompas.com, 2024; Media Indonesia, 2024; Radar Banjarmasin, 2024; Tribun Banjarmasin, 2024).

Kasus korupsi di tingkat daerah seperti ini menunjukkan masih lemahnya tata kelola pemerintahan dan sistem pengawasan di Indonesia. Menurut laporan *Transparency International* (2023), Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index/CPI*) Indonesia pada tahun 2023 berada di peringkat 110 dari 180 negara dengan skor 34/100. Skor ini menunjukkan bahwa Indonesia masih dipersepsikan sebagai negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Muhtar et al. (2021) menyatakan bahwa korupsi di tingkat daerah seringkali terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang, lemahnya sistem pengawasan, dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.

Pemberitaan media massa mengenai kasus korupsi memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan mendorong upaya pemberantasan korupsi. Strömbäck et al. (2022) berpendapat bahwa cara media membingkai (*framing*) suatu isu dapat memengaruhi bagaimana masyarakat memahami dan menyikapi isu tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pembentuk opini yang dapat memengaruhi sikap masyarakat terhadap korupsi (Anshori, 2018; Malau, 2023). Dalam konteks ini, analisis *framing* dapat digunakan untuk memahami bagaimana media mengkonstruksi realitas sosial terkait korupsi melalui pemilihan kata, penekanan isu tertentu, dan cara penyajian berita (Malau, 2023).

Perbedaan *framing* antara media lokal dan nasional dalam memberitakan kasus korupsi daerah menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji perbedaan *framing* media lokal dan nasional dalam berbagai isu. Penelitian mengenai *framing* dalam pemberitaan Pilkada menunjukkan bahwa media lokal dan nasional sering kali memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyajikan berita. Misalnya, penelitian oleh Hasan dan Fathan (Hasan & Fathan, 2020) menunjukkan bahwa media lokal cenderung lebih fokus pada isu-isu yang relevan dengan komunitas setempat. Sedangkan, media nasional mungkin lebih menekankan pada aspek politik yang lebih luas dan dampaknya terhadap kebijakan nasional. Hal ini sejalan dengan temuan dari Pinontoan and Wahid (2020), serta Hanief and Ainani (2024), yang mengungkapkan bahwa *framing* berita dapat berbeda tergantung pada konteks dan tujuan dari masing-masing media. Namun, masih sedikit penelitian yang secara khusus membandingkan *framing* media lokal dan nasional dalam pemberitaan kasus korupsi di daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan bagaimana media lokal Kalimantan Selatan dan media online nasional membingkai pemberitaan tentang Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Analisis akan dilakukan terhadap empat artikel berita dari dua media lokal Kalimantan Selatan (Tribun Banjarmasin dan Radar Banjarmasin) dan dua media online nasional (Kompas.com dan Media Indonesia) yang memberitakan kasus tersebut.

Tabel 1. Artikel Berita yang Dianalisis

No.	Judul Artikel	Media	Tanggal Terbit	URL

1	Kadis PUPR Kalsel Kenakan Rompi Tahanan, KPK Sita Uang Rp 10 Miliar Lebih	<i>Tribun Banjarmasin</i>	8 Oktober 2024	https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/10/08/kadis-pupr-kalsel-kenakan-rompi-tahanan-kpk-sita-uang-rp-10-miliar-lebih
2	KPK Ungkap Aliran Dana OTT di Dinas PUPR Kalsel, Petaka Fee Proyek, Begini Detailnya	<i>Radar Banjarmasin</i>	8 Oktober 2024	https://radarbanjarmasin.jawapos.com/hukum-peristiwa/1975177258/kpk-ungkap-aliran-dana-ott-di-dinas-pupr-kalsel-petaka-fee-proyek-begini-detailnya
3	OTT di Kalsel Seret Gubernur Sahbirin Noor, Diduga Terima Fee 5 Persen	<i>Kompas.com</i>	9 Oktober 2024	https://nasional.kompas.com/read/2024/10/09/06134091/ott-di-kalsel-seret-gubernur-sahbirin-noor-diduga-terima-fee-5-persen?page=all
4	KPK Dalam Motif Paman Birin Menerima Rp12,1 Miliar	<i>Media Indonesia</i>	9 Oktober 2024	https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/707482/kpk-dalami-motif-paman-birin-menerima-rp121-miliar

Sumber: Data Penelitian, 2024

Analisis framing terhadap pemberitaan kasus korupsi penting dilakukan karena dapat mengungkap bagaimana media berperan dalam membentuk persepsi publik terhadap isu korupsi. Salah satu aspek penting dari framing adalah bagaimana media memilih untuk menyoroti elemen tertentu dari kasus korupsi. Misalnya, dalam studi yang dilakukan oleh Malau, ditemukan bahwa media seperti Kompas.com dan CNN Indonesia menggunakan kata-kata dan bahasa yang spesifik untuk membangun pemahaman masyarakat mengenai kasus korupsi, dengan menekankan unsur-unsur seperti "korupsi", "pemerintah", dan "keamanan

publik" (Malau, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa framing dapat digunakan untuk menciptakan kesadaran publik tentang bahaya korupsi dan dampaknya terhadap masyarakat.

Selain itu, media juga memiliki peran penting dalam pendidikan dan literasi antikorupsi. Meskipun banyak media yang fokus pada pemberitaan kasus korupsi, mereka sering kali kurang memberikan perhatian pada aspek edukasi yang dapat membantu masyarakat memahami dan menghindari tindakan korupsi (Bajari & Wahyudin, 2019). Dalam konteks ini, penting bagi media untuk tidak hanya melaporkan kasus korupsi, tetapi juga untuk memberikan informasi yang mendidik dan membangun sikap antikorupsi di kalangan generasi muda (Bajari & Wahyudin, 2019; Shaliadi & Dannur, 2023).

Pemilihan media lokal dan nasional sebagai objek analisis didasarkan pada asumsi bahwa kedua jenis media tersebut memiliki perspektif dan kepentingan yang berbeda dalam memberitakan kasus korupsi daerah. Media lokal, yang memiliki kedekatan geografis dan emosional dengan daerah yang diberitakan, mungkin memiliki akses informasi yang lebih detail, tetapi juga berpotensi menghadapi dilema dalam menjaga objektivitas pemberitaan. Di sisi lain, media nasional mungkin memiliki sudut pandang yang lebih luas, tetapi kurang detail dalam pemberitaan kasus daerah. Perbedaan ini dapat memengaruhi bagaimana kedua jenis media tersebut membingkai pemberitaan kasus korupsi daerah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam kajian jurnalisme dan komunikasi politik. Secara teoretis, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana media lokal dan nasional membingkai isu-isu sensitif seperti korupsi di tingkat daerah. Hal ini sejalan dengan pandangan Strömbäck et al. (2022) yang menekankan pentingnya memahami peran media dalam membentuk diskursus publik tentang isu-isu politik dan pemerintahan.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi praktisi media dalam meningkatkan kualitas dan objektivitas pemberitaan kasus korupsi. Selain itu, temuan penelitian juga dapat menjadi masukan bagi pemangku kepentingan dalam upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan tata kelola pemerintahan daerah.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan kunci. Pertama, bagaimana media lokal Kalimantan Selatan membingkai pemberitaan OTT KPK di Pemprov Kalimantan Selatan? Kedua, bagaimana media online nasional membingkai pemberitaan yang sama? Ketiga, apa perbedaan dan persamaan framing antara media lokal dan nasional dalam pemberitaan kasus tersebut? Melalui analisis framing komparatif ini,

diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana media lokal dan nasional memainkan perannya dalam memberitakan kasus korupsi daerah, serta implikasinya terhadap upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis *framing* model Robert M. Entman. Penggunaan model Entman dalam penelitian ini didasarkan pada kemampuannya untuk mengungkap bagaimana media membangun realitas melalui pemilihan dan penekanan aspek-aspek tertentu dari suatu isu. Hal ini sejalan dengan pandangan Scheufele dan Tewksbury (2022) yang menyatakan bahwa *framing* tidak hanya terkait dengan apa yang diberitakan, tetapi juga bagaimana suatu isu dipresentasikan. Model ini berfokus pada empat elemen utama: pendefinisian masalah (*define problems*), memperkirakan sumber *masalah* (*diagnose causes*), membuat keputusan moral (*make moral judgement*), dan menekankan penyelesaian (*treatment recommendation*).

Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya dalam mengeksplorasi dan memahami makna yang dilekatkan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial atau kemanusiaan (Creswell & Poth, 2018). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam bagaimana media membingkai pemberitaan kasus korupsi.

Objek penelitian ini adalah artikel berita tentang Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dimuat di empat media *online*: dua media lokal Kalimantan Selatan (*Tribun Banjarmasin* dan *Radar Banjarmasin*) dan dua media nasional (*Kompas.com* dan *Media Indonesia*). Pemilihan media ini didasarkan pada pertimbangan keterwakilan perspektif lokal dan nasional, serta tingkat popularitas media tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi artikel berita yang terbit pada periode 8 – 9 Oktober 2024, yaitu periode awal pemberitaan kasus tersebut. Pemilihan periode ini didasarkan pada asumsi bahwa *framing* media pada awal pemberitaan suatu kasus cenderung lebih kuat dan berpengaruh dalam membentuk opini publik (Lecheler, 2019).

Analisis data dilakukan dengan mengawalinya dengan membaca keseluruhan artikel untuk memperoleh gambaran umum mengenai isi dari artikel tersebut. Setelah mendapatkan pemahaman yang menyeluruh, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi unit analisis

berupa kalimat atau paragraf yang relevan dengan empat elemen *framing* Entman. Unit analisis yang telah diidentifikasi kemudian dikategorikan ke dalam empat elemen *framing* Entman untuk memudahkan proses analisis lebih lanjut. Setelah pengkategorian selesai dilakukan, interpretasi makna dari setiap elemen *framing* dilakukan untuk memahami bagaimana masing-masing media membingkai pemberitaan terkait kasus OTT tersebut. Langkah terakhir dalam analisis data adalah membandingkan *framing* antara media lokal dan nasional untuk melihat persamaan dan perbedaan dalam pembedaan berita di kedua jenis media.

Untuk memastikan kredibilitas penelitian, peneliti menerapkan beberapa strategi. Pertama, triangulasi sumber data dengan menggunakan *multiple media outlets*. Kedua, *peer debriefing* dengan melibatkan peneliti lain untuk meninjau dan mengkritisi proses penelitian. Ketiga, *member checking* dengan mengkonfirmasi interpretasi peneliti kepada pihak media yang diteliti (Lincoln, 1985; Tracy, 2024).

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, analisis hanya dilakukan pada empat media *online*, sehingga mungkin tidak merepresentasikan keseluruhan *landscape* media di Indonesia. Kedua, periode pengambilan data yang singkat mungkin tidak menangkap dinamika *framing* media dalam jangka panjang. Namun, keterbatasan ini dapat menjadi peluang untuk penelitian lanjutan yang lebih komprehensif.

Meskipun demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana media lokal dan nasional membingkai isu korupsi daerah. Pemahaman ini penting tidak hanya bagi kajian jurnalisme dan komunikasi politik, tetapi juga bagi upaya peningkatan kualitas pemberitaan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis *framing* terhadap pemberitaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada empat media online (Tribun Banjarmasin, Radar Banjarmasin, Kompas.com, dan Media Indonesia) menghasilkan temuan yang menarik. Hasil analisis ini didasarkan pada empat elemen *framing* Entman: pendefinisian masalah, memperkirakan sumber masalah, membuat keputusan moral, dan menekankan penyelesaian. Dalam pendefinisian masalah, terlihat perbedaan yang signifikan antara media lokal dan nasional. Media lokal, yaitu Tribun Banjarmasin dan Radar Banjarmasin, cenderung mendefinisikan masalah sebagai kasus suap dalam proyek infrastruktur dan praktik korupsi

sistematis di pemerintahan daerah. *Tribun Banjarmasin*, misalnya, menulis: "KPK menyita uang lebih dari Rp 10 miliar dari OTT terhadap Kadis PUPR Kalsel terkait dugaan suap proyek infrastruktur." Sementara itu, *Radar Banjarmasin* menekankan aspek sistematis dari korupsi tersebut: "OTT di Dinas PUPR Kalsel mengungkap aliran dana dan praktik fee proyek yang telah berlangsung lama."

Di sisi lain, media nasional seperti *Kompas.com* dan *Media Indonesia* cenderung mendefinisikan masalah dengan menekankan keterlibatan pejabat tinggi. *Kompas.com* menulis: "OTT KPK di Kalsel menyeret Gubernur Sahbirin Noor, menunjukkan keterlibatan langsung pejabat tinggi daerah dalam praktik korupsi." *Media Indonesia* bahkan lebih eksplisit dalam menyoroti peran kepala daerah: "Kasus ini menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah dalam pengelolaan anggaran dan proyek."

Tabel 2. Pendefinisian Masalah pada Keempat Media

Media	Pendefinisian Masalah
<i>Tribun Banjarmasin</i>	Kasus suap dalam proyek infrastruktur
<i>Radar Banjarmasin</i>	Praktik korupsi sistematis di pemerintahan daerah
<i>Kompas.com</i>	Keterlibatan pejabat tinggi dalam korupsi daerah
<i>Media Indonesia</i>	Penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah

Perbedaan pendefinisian masalah ini sejalan dengan temuan Reinemann et al., (2021) yang menunjukkan bahwa media lokal dan nasional seringkali memiliki sudut pandang berbeda dalam membingkai isu-isu politik dan pemerintahan. Media lokal cenderung berfokus pada dampak langsung terhadap masyarakat setempat, sementara media nasional lebih menekankan implikasi politik yang lebih luas.

Dalam memperkirakan sumber masalah, perbedaan antara media lokal dan nasional juga terlihat jelas. Media lokal cenderung melihat sumber masalah pada aspek-aspek praktis dan kultural. *Tribun Banjarmasin*, misalnya, menyoroti lemahnya pengawasan dalam

pelaksanaan proyek sebagai akar masalah, sementara Radar Banjarmasin lebih menekankan pada budaya korupsi yang telah mengakar dalam birokrasi pemerintahan daerah.

Media nasional, sebaliknya, cenderung melihat sumber masalah dari perspektif yang lebih luas dan struktural. Kompas.com menekankan kurangnya integritas pejabat publik, sementara Media Indonesia mengaitkan kasus ini dengan sistem politik yang lebih luas yang masih memberi ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh elit daerah. Perbedaan sudut pandang ini mencerminkan apa yang disebut oleh Scheufele dan Tewksbury (2022) sebagai "frame building", di mana media membangun frame berdasarkan berbagai faktor, termasuk orientasi ideologis, rutinitas organisasi, dan pengaruh eksternal.

Dalam aspek keputusan moral, keempat media menunjukkan kesamaan dalam mengutuk praktik korupsi, tetapi dengan penekanan yang berbeda. Media lokal cenderung menekankan dampak korupsi terhadap pembangunan daerah dan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Media nasional, di sisi lain, lebih menyoroti dampak korupsi terhadap citra pemerintahan dan sistem demokrasi secara lebih luas.

Tabel 3. Keputusan Moral pada Keempat Media

Media	Keputusan Moral
<i>Tribun Banjarmasin</i>	Korupsi merugikan pembangunan daerah
<i>Radar Banjarmasin</i>	Korupsi adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat
<i>Kompas.com</i>	Korupsi pejabat tinggi mencoreng citra pemerintahan
<i>Media Indonesia</i>	Korupsi sistemik merusak demokrasi dan tata kelola pemerintahan

Sumber: Hasil Analisis Data, 2024

Perbedaan penekanan dalam keputusan moral ini mencerminkan apa yang disebut oleh Entman (1993) sebagai "salience", di mana media membuat beberapa aspek dari realitas yang dirasakan menjadi lebih menonjol dalam teks yang dikomunikasikan. Hal ini juga sejalan

dengan temuan Malau (2023) yang menunjukkan bahwa framing media dalam pemberitaan korupsi dapat memengaruhi persepsi publik terhadap urgensi dan dampak dari tindak korupsi. Dalam menekankan penyelesaian, media lokal dan nasional juga menunjukkan perbedaan yang signifikan. Media lokal cenderung menekankan solusi-solusi praktis seperti penguatan sistem pengawasan dan reformasi birokrasi. Sementara itu, media nasional lebih menekankan pada penegakan hukum yang tegas dan reformasi sistem politik yang lebih luas.

Perbedaan penekanan penyelesaian ini mencerminkan apa yang disebut oleh Strömbäck et al., (2022) sebagai "solution framing", di mana media tidak hanya menyajikan masalah, tetapi juga memberikan pandangan tentang solusi yang dianggap tepat. Media yang kritis dapat membantu menciptakan ruang bagi dialog antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks ini, media berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan suara masyarakat dengan pengambil keputusan. Dengan melaporkan isu-isu yang relevan dan memberikan platform bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka, media dapat memperkuat partisipasi demokratis dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan (Ayomi et al., 2023; Badr et al., 2022).

Secara keseluruhan, analisis framing ini mengungkapkan bagaimana media lokal dan nasional memiliki perspektif yang berbeda dalam membingkai kasus korupsi daerah. Perbedaan ini tidak hanya mencerminkan perbedaan fokus dan kepentingan antara media lokal dan nasional, tetapi juga menunjukkan kompleksitas dalam pemberitaan isu-isu korupsi di Indonesia. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi pemahaman kita tentang peran media dalam membentuk persepsi publik terhadap isu-isu korupsi dan upaya pemberantasannya.

Diskusi

Analisis framing terhadap pemberitaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengungkapkan perbedaan signifikan antara cara media lokal dan nasional membingkai kasus tersebut. Perbedaan ini terlihat jelas dalam keempat elemen framing Entman: pendefinisian masalah, perkiraan sumber masalah, keputusan moral, dan penekanan penyelesaian.

Media lokal seperti Tribun Banjarmasin dan Radar Banjarmasin cenderung membingkai kasus dalam konteks lokal, menekankan dampak langsung terhadap pembangunan daerah dan masyarakat Kalimantan Selatan. Sebaliknya, media nasional seperti Kompas.com dan Media Indonesia melihat kasus dalam konteks yang lebih luas, mengaitkannya dengan isu-isu nasional seperti sistem politik dan tata kelola pemerintahan. Perbedaan ini sejalan dengan

temuan Nielsen (2015) dan mencerminkan "hierarchy of influences" yang dikemukakan oleh Shoemaker dan Reese, (2021).

Dalam hal kedalaman dan keluasan pemberitaan, media lokal cenderung memberikan informasi yang lebih detail tentang kasus, termasuk proyek-proyek yang terlibat dan aliran dana. Hal ini mungkin disebabkan oleh akses yang lebih baik terhadap sumber-sumber lokal. Media nasional, di sisi lain, memberikan pemberitaan yang lebih luas, mengaitkan kasus dengan tren korupsi di daerah secara umum dan implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan nasional. Perbedaan ini mencerminkan "cascading network activation" yang dijelaskan oleh Entman et al., (2019).

Dalam memperkirakan sumber masalah dan menekankan penyelesaian, media lokal cenderung berfokus pada aspek-aspek praktis seperti lemahnya pengawasan dan perlunya reformasi birokrasi. Media nasional lebih cenderung melihat persoalan struktural seperti sistem politik yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan. Perbedaan ini sejalan dengan temuan Reinemann et al., (2021) tentang "interpretive frameworks" yang berbeda antara media lokal dan nasional.

Perbedaan framing ini berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap kasus korupsi dan upaya penanganannya. Sesuai dengan teori agenda-setting dan framing, cara media membingkai isu dapat memengaruhi pemahaman dan sikap publik. Framing media lokal yang lebih fokus pada dampak langsung mungkin akan mendorong tuntutan perbaikan segera dalam tata kelola pemerintahan daerah. Sementara, framing media nasional yang menekankan aspek struktural dapat mendorong diskusi publik yang lebih luas tentang reformasi sistem politik dan pemberantasan korupsi di tingkat nasional.

Analisis ini juga mengungkapkan tantangan etis dalam pemberitaan kasus korupsi. Media lokal mungkin menghadapi dilema dalam menjaga objektivitas, sementara media nasional mungkin kesulitan menyajikan kompleksitas kasus lokal tanpa oversimplifikasi. Sesuai pandangan Ward (2018), jurnalisme etis harus menyeimbangkan kewajiban menginformasikan publik dengan potensi dampak pemberitaan terhadap proses hukum dan reputasi pihak-pihak yang terlibat.

Perbedaan framing juga merefleksikan peran berbeda yang dimainkan media lokal dan nasional dalam upaya pemberantasan korupsi. Media lokal dapat berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat lokal, sementara media nasional dapat membentuk agenda nasional terkait pemberantasan korupsi. Namun, efektivitas peran media ini bergantung

pada faktor-faktor seperti kebebasan pers, literasi media masyarakat, dan responsivitas pemerintah.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting terhadap kebijakan media dan upaya pemberantasan korupsi. Diperlukan sinergi antara media lokal dan nasional, penguatan jurnalisme investigatif, peningkatan literasi media masyarakat, dan reformasi kebijakan antikorupsi, terutama di tingkat daerah. Dengan demikian, media dapat memainkan peran lebih efektif dalam mendorong good governance dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Perbedaan framing antara media lokal dan nasional dalam pemberitaan kasus OTT KPK di Pemprov Kalimantan Selatan juga memiliki implikasi penting terhadap persepsi dan partisipasi publik dalam isu korupsi. Sebagaimana diungkapkan oleh Strömbäck et al. (2022), framing media dapat memengaruhi partisipasi politik masyarakat, baik secara online maupun offline. Dalam konteks ini, framing yang berbeda antara media lokal dan nasional berpotensi menghasilkan respons publik yang beragam, baik dalam hal sikap maupun tindakan terkait isu korupsi.

Aspek etika jurnalistik dalam pemberitaan kasus korupsi juga menjadi sorotan penting dalam analisis ini. Media lokal, dengan kedekatannya pada konteks dan aktor lokal, mungkin menghadapi dilema dalam menjaga objektivitas pemberitaan. Di sisi lain, media nasional mungkin menghadapi tantangan dalam menyajikan kompleksitas kasus lokal tanpa melakukan oversimplifikasi. Sebagaimana ditekankan oleh Ward (2018), jurnalisme etis dalam pemberitaan korupsi harus mampu menyeimbangkan antara kewajiban untuk menginformasikan publik dan potensi dampak pemberitaan terhadap proses hukum serta reputasi pihak-pihak yang terlibat.

Analisis terhadap penggunaan bahasa dalam pemberitaan menunjukkan bahwa keempat media cenderung menggunakan bahasa yang hati-hati, dengan menggunakan kata-kata seperti "diduga", "terindikasi", dan "disangka". Hal ini mencerminkan upaya media untuk menjaga asas praduga tak bersalah, sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik Indonesia yang ditetapkan oleh Dewan Pers Indonesia (2018). Penggunaan bahasa yang hati-hati ini menunjukkan adanya kesadaran etis dalam pemberitaan kasus korupsi, meskipun tantangan tetap ada dalam menyeimbangkan antara kewajiban menginformasikan publik dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Peran media dalam pemberantasan korupsi juga tergambar jelas melalui perbedaan framing ini. Media lokal, dengan pemberitaannya yang lebih detail dan kontekstual, berpotensi

berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat lokal dan mendorong partisipasi publik dalam pengawasan pemerintahan daerah. Sementara itu, media nasional, dengan perspektifnya yang lebih luas, dapat berperan dalam membentuk agenda nasional terkait pemberantasan korupsi dan mendorong reformasi sistemik. Hal ini sejalan dengan pandangan Coronel (2015) yang menekankan peran penting media dalam mempromosikan good governance dan memberantas korupsi.

Namun, efektivitas peran media dalam pemberantasan korupsi tidak berdiri sendiri. Ia bergantung pada berbagai faktor seperti kebebasan pers, literasi media masyarakat, dan responsivitas pemerintah terhadap pemberitaan media. Dalam beberapa kasus, media mungkin terpaksa mengubah atau membatasi pemberitaan mereka terkait isu-isu sensitif, termasuk korupsi, akibat tekanan dari pihak-pihak tertentu (Ikhwan et al., 2017; Suyanto, 2018). Oleh karena itu, penting bagi media untuk menjaga integritas dan independensinya agar dapat menjalankan perannya secara efektif dalam pemberantasan korupsi.

Lebih lanjut, perbedaan framing antara media lokal dan nasional dalam pemberitaan kasus OTT KPK di Pemprov Kalimantan Selatan juga mencerminkan kompleksitas lanskap media di Indonesia. Keberagaman perspektif ini, di satu sisi, dapat dilihat sebagai kekayaan informasi yang memungkinkan publik untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang suatu isu. Namun, di sisi lain, hal ini juga dapat menimbulkan tantangan dalam membentuk pemahaman publik yang koheren tentang isu korupsi dan upaya penanganannya.

Dalam konteks ini, peran literasi media menjadi semakin krusial. Masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk menganalisis dan menginterpretasi berbagai sudut pandang yang disajikan oleh media yang berbeda. Hal ini sejalan dengan pandangan (Mihailidis & Thevenin, 2013) yang menekankan pentingnya pendidikan literasi media dalam membangun masyarakat yang kritis dan partisipatif. Dengan kemampuan literasi media yang baik, publik dapat lebih baik dalam memahami kompleksitas isu korupsi dan berpartisipasi secara lebih efektif dalam upaya pengawasan dan pemberantasan korupsi.

Selain itu, perbedaan framing antara media lokal dan nasional juga menunjukkan adanya ketegangan antara perspektif lokal dan nasional dalam memahami dan menangani isu korupsi. Media lokal, dengan fokusnya pada dampak langsung dan konteks spesifik daerah, memiliki potensi untuk memobilisasi aksi lokal dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Sementara itu, media nasional, dengan perspektifnya yang lebih luas, dapat mendorong

perubahan sistemik dan reformasi kebijakan di tingkat nasional. Keduanya memiliki peran penting dan saling melengkapi dalam upaya pemberantasan korupsi.

Namun, perbedaan ini juga dapat menimbulkan tantangan dalam koordinasi upaya antikorupsi antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagaimana diungkapkan oleh Klitgaard et al., (2000), strategi antikorupsi yang efektif membutuhkan sinergi antara berbagai tingkat pemerintahan dan pemangku kepentingan. Dalam hal ini, media dapat memainkan peran penting sebagai jembatan antara perspektif lokal dan nasional, memfasilitasi dialog dan pemahaman bersama tentang kompleksitas isu korupsi dan strategi penanganannya.

Lebih jauh lagi, temuan penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih nuansir dalam memahami peran media dalam pemberantasan korupsi. Tidak cukup hanya melihat media sebagai entitas tunggal, tetapi perlu memahami keragaman peran dan perspektif yang dibawa oleh media yang berbeda. Hal ini sejalan dengan pandangan Waisbord (2000) yang menekankan pentingnya memahami dinamika internal media dan interaksinya dengan berbagai kekuatan sosial-politik dalam konteks pemberitaan korupsi.

Dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman geografis dan sosial-budaya yang tinggi, pemahaman terhadap nuansa pemberitaan media lokal dan nasional menjadi semakin penting. Hal ini dapat membantu dalam merancang strategi komunikasi antikorupsi yang lebih efektif dan responsif terhadap konteks lokal, sambil tetap mempertahankan koherensi dengan agenda nasional.

Akhirnya, penelitian ini juga membuka jalan bagi eksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana dinamika media lokal dan nasional berperan dalam membentuk wacana publik tentang isu-isu penting lainnya di Indonesia. Pemahaman yang lebih mendalam tentang hal ini dapat memberikan wawasan berharga bagi pengembangan kebijakan media, strategi komunikasi publik, dan upaya penguatan demokrasi di Indonesia.

Dengan demikian, analisis framing terhadap pemberitaan kasus OTT KPK di Pemprov Kalimantan Selatan tidak hanya memberikan pemahaman tentang bagaimana isu korupsi dibingkai oleh media yang berbeda, tetapi juga membuka diskusi yang lebih luas tentang peran media dalam tata kelola pemerintahan, partisipasi publik, dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Meskipun penelitian ini telah berupaya memberikan analisis yang komprehensif, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Salah satu keterbatasan utama adalah jumlah media yang dianalisis. Penelitian ini hanya menganalisis empat media online, yang mungkin

tidak sepenuhnya merepresentasikan keseluruhan landscape media di Indonesia. Hal ini membuka peluang bagi penelitian masa depan untuk memperluas cakupan dengan melibatkan lebih banyak media, termasuk media cetak dan penyiaran, guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

Selain itu, periode analisis yang relatif singkat menjadi keterbatasan lain dalam penelitian ini. Analisis hanya dilakukan pada pemberitaan awal kasus (8 – 9 Oktober 2024), sehingga mungkin tidak menangkap dinamika framing dalam jangka panjang. Untuk mengatasi hal ini, penelitian lanjutan dapat mengadopsi pendekatan longitudinal untuk melihat bagaimana framing berubah seiring perkembangan kasus, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang evolusi narasi media seiring waktu.

Fokus penelitian yang terbatas pada teks berita juga menjadi salah satu keterbatasan. Penelitian ini tidak mempertimbangkan elemen visual seperti foto atau infografis, yang bisa jadi memiliki peran penting dalam pembingkai berita. Oleh karena itu, penelitian masa depan dapat mengadopsi pendekatan multimodal untuk menganalisis bagaimana elemen visual berkontribusi pada framing berita, memperkaya pemahaman kita tentang strategi pembingkai media yang lebih komprehensif.

Keterbatasan lain yang perlu diperhatikan adalah tidak adanya analisis resepsi audiens. Penelitian ini tidak mengkaji bagaimana audiens menerima dan memaknai framing media, yang sebenarnya bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas framing media dalam membentuk opini publik. Studi resepsi audiens di masa depan dapat mengisi kesenjangan ini, memberikan wawasan berharga tentang dampak nyata framing media terhadap persepsi publik.

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan tersebut, beberapa arah penelitian masa depan dapat dipertimbangkan. Pertama, studi komparatif yang lebih luas, melibatkan lebih banyak media dari berbagai platform, dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang landscape framing media di Indonesia. Kedua, analisis longitudinal dapat dilakukan untuk melihat evolusi framing sepanjang perkembangan kasus, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika framing media seiring waktu.

Selain itu, analisis framing multimodal yang mempertimbangkan elemen visual dalam pemberitaan dapat memperkaya pemahaman kita tentang strategi pembingkai media yang lebih komprehensif. Studi resepsi audiens juga penting untuk dilakukan guna memahami

bagaimana publik memaknai framing media, memberikan wawasan tentang efektivitas strategi framing dalam membentuk opini publik.

Terakhir, penelitian lintas kasus dapat dilakukan untuk melihat apakah pola framing yang ditemukan dalam kasus ini juga berlaku untuk kasus-kasus korupsi daerah lainnya. Hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi pola-pola umum dalam pembingkai kasus korupsi oleh media di Indonesia, memberikan pemahaman yang lebih luas tentang peran media dalam isu-isu korupsi di tingkat daerah.

KESIMPULAN

Analisis framing terhadap pemberitaan OTT KPK di Pemrov Kalimantan Selatan menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara framing media lokal dan nasional. Media lokal cenderung membingkai kasus dalam konteks lokal dengan penekanan pada dampak langsung dan solusi praktis, sementara media nasional cenderung melihatnya dalam konteks yang lebih luas dengan penekanan pada isu-isu struktural. Perbedaan framing ini mencerminkan kompleksitas dalam pemberitaan kasus korupsi daerah dan menunjukkan pentingnya sinergi antara media lokal dan nasional untuk memberikan gambaran yang komprehensif kepada publik. Temuan penelitian juga menyoroti tantangan etis dalam pemberitaan korupsi dan pentingnya penguatan jurnalisme investigatif serta peningkatan literasi media di kalangan masyarakat. Implikasi dari penelitian ini meliputi perlunya reformasi kebijakan media dan antikorupsi, serta pentingnya peran media dalam mendorong good governance dan pemberantasan korupsi. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang peran media dalam membingkai isu-isu korupsi daerah dan membuka jalan bagi penelitian lanjutan yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, D. S. (2018). Stigma negatif bahasa korupsi dalam pemberitaan media massa. *Litera*, 17(2).
- Ayomi, P. N., Candra, K. D. P., & Sulatra, I. K. (2023). Speech act and experiential analysis of Bali Netizen reactions to the pandemic regulation posts. *Rainbow: Journal of Literature, Linguistics and Culture Studies*, 12(2), 86–92.
- Badr, A., Mohamed, T. I., Osman, N. A. Q., & Mikhaylov, A. (2022). *A review of social media*

- website users' interaction paths with governmental accounts during the COVID-19 pandemic. Informatics, 9, 50.*
- Bajari, A., & Wahyudin, U. (2019). Pemanfaatan mading dan website dalam membentuk sikap antikorupsi siswa di kota Kupang. *Jurnal Kajian Komunikasi, 7(1), 59–72.*
- Coronel, S. (2015). Corruption and the watchdog role of the news media. *Public sentinel: News media and governance reform, 111–136.*
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches.* Sage publications.
- Kode Etik Jurnalistik, 1 (2018). www.dewanpers.or.id
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of communication, 43(4), 51–58.*
- Entman, R. M., Matthes, J., & Pellicano, L. (2019). Nature, sources, and effects of news framing. In *The handbook of journalism studies* (hal. 195–210). Routledge.
- Hanief, L., & Ainani, M. (2024). Framing Analysis of Israel-Palestine Conflict News on Online Media Detik.com and Republika.co.id. *Jurnal Kajian Jurnalisme, 8(1), 86–98.* <https://doi.org/10.24198/jkj.v8i1.53602>
- Hasan, I., & Fathan, F. (2020). *Analisis Framing Berita Politik Menjelang Pilkada Klaten Tahun 2020 pada Solopos. com.*
- Ikhwan, A. N., Subroto, B., & Ghofar, A. (2017). The Influence of Accountability on Clean-corruption Perception in Local Government. *Assets: Jurnal akuntansi dan pendidikan, 5(2), 129–146.*
- Index, C. P. (2023). Corruption perception index. *Transparency International.*
- Klitgaard, R. E., Abaroa, R. M., & Parris, H. L. (2000). *Corrupt cities: a practical guide to cure and prevention.* World Bank Publications.
- Kompas.com.* (2024, Oktober 9). *OTT di Kalsel Seret Gubernur Sahbirin Noor, Diduga Terima Fee 5 Persen.* <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/09/06134091/ott-di-kalsel-seret-gubernur-sahbirin-noor-diduga-terima-fee-5-persen?page=all>
- Lecheler, S. (2019). *Framing Effects in Political Communication.*

<https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199756223/obo-9780199756223-0269.xml>

Lincoln, Y. S. (1985). *Naturalistic inquiry* (Vol. 75). sage.

Malau, R. M. U. (2023). Komodifikasi Kasus Korupsi; Framing Media Operasi Penangkapan Wali Kota Bandung oleh Kompas. com dan CNN. Indonesia. *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(2), 175–181.

Media Indonesia. (2024, Oktober 9). *KPK Dalami Motif Paman Birin Menerima Rp 12,1 Miliar*. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/707482/kpk-dalami-motif-paman-birin-menerima-rp121-miliar>

Mihailidis, P., & Thevenin, B. (2013). Media literacy as a core competency for engaged citizenship in participatory democracy. *American behavioral scientist*, 57(11), 1611–1622.

Muhtar, Sutaryo, & Sriyanto. (2021). Corruption in Indonesian local government: Study on triangle fraud theory. *International Journal of Business and Society*, 19(2), 536–552.

Nielsen, R. K. (2015). *Local journalism: The decline of newspapers and the rise of digital media*. Bloomsbury Publishing.

Pinontoan, N. A., & Wahid, U. (2020). Analisis Framing Pemberitaan Banjir Jakarta Januari 2020 Di Harian Kompas. Com Dan Jawapos. Com. *Komuniti: Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, 12(1), 11–24.

Radar Banjarmasin. (2024, Oktober 8). *KPK Ungkap Aliran Dana OTT di Dinas PUPR Kalsel, Petaka Fee Proyek, Begini Detailnya*. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/hukum-peristiwa/1975177258/kpk-ungkap-aliran-dana-ott-di-dinas-pupr-kalsel-petaka-fee-proyek-begini-detailnya>

Reinemann, C., Stanyer, J., Scherr, S., & Legnante, G. (2021). Hard and soft news: A review of concepts, operationalizations and key findings. *Journalism*, 13(2), 221–239.

Scheufele, D. A., & Tewksbury, D. (2022). Framing, agenda setting, and priming: The evolution of three media effects models. *Journal of communication*, 57(1), 9–20.

Shaliadi, I., & Dannur, M. (2023). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah. *Anayasa: Journal of Legal Studies*, 1(1 Juli), 15–22.

-
- Shoemaker, P. J., & Reese, S. D. (2021). *Mediating the message in the 21st century: A media sociology perspective*. Routledge.
- Strömbäck, J., Falasca, K., & Kruikemeier, S. (2022). The mix of media use matters: Investigating the effects of individual news repertoires on offline and online political participation. *Political Communication*, 35(3), 413–432.
- Suyanto, A. A. (2018). Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Rasuah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 1(1), 39–67.
- Tracy, S. J. (2024). *Qualitative research methods: Collecting evidence, crafting analysis, communicating impact*. John Wiley & Sons.
- Tribun Banjarmasin*. (2024, Oktober 8). *Ini Jumlah Uang yang Disita dari OTT KPK di Kalsel, Kadis PUPR Pun Kenakan Rompi Tahanan*.
<https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/10/08/kadis-pupr-kalsel-kenakan-rompi-tahanan-kpk-sita-uang-rp-10-miliar-lebih>
- Waisbord, S. (2000). *Watchdog journalism in South America—News, accountability, and democracy*. Columbia University Press.
- Ward, S. J. A. (2018). *Ethical journalism in a populist age: The democratically engaged journalist*. Rowman & Littlefield.